

PLURALITAS AGAMA: TANTANGAN “BARU” BAGI PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

WAHYU PRAMUDYA

PENDAHULUAN

Pluralitas agama sebenarnya bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia. Selama masa orde baru saja, secara *de jure* diakui oleh pemerintah eksistensi lima agama dan puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan.¹ Setiap penduduk Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas agama ini di dalam kehidupan keseharian. Bertetangga, bekerja, dan bersekolah dengan orang yang berlainan agama adalah suatu kenyataan yang dengan mudah ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Pluralitas agama telah menjadi bagian dari apa artinya menjadi penduduk Indonesia. Menyangkal adanya realita ini adalah sebuah kenaiifan.

Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa menjadi potensi yang kuat, apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi, maka akan terbentuk sebuah mozaik kehidupan yang indah dan enak untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajukan itu sendiri menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang besar. Perbedaan-perbedaan ajaran agama, apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, maka dapat memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan meluas. Tampaknya itu yang sedang terjadi pada saat ini.

Tulisan ini akan mencoba menganalisis praktik pendidikan agama saat ini dan mencoba mencari satu bentuk pendidikan agama yang cocok di tengah pluralitas agama yang ada. Ini bukan tantangan baru, tetapi “baru,” karena toh sebenarnya tantangan ini sudah cukup lama ada, tetapi tampaknya belum ada tanggapan yang cukup memadai. Selain itu tantangan ini disebut “baru” karena dinamika relasi antar agama yang terus berkembang hingga saat ini.

¹Untuk mendapatkan riwayat agama-agama dan aneka kepercayaan di Indonesia, perhatikan apa yang ditulis oleh Robert Hardawinarya, *Dialog Umat Kristiani dengan Umat Pluri-Agama/-Kepercayaan di Nusantara* (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 27-45.

APAKAH KONFLIK ANTARAGAMA SEDANG TERJADI DI INDONESIA?

Setelah euforia reformasi, ternyata banyak terjadi konflik berdarah di berbagai daerah di Indonesia. Baik diakui ataupun tidak, kebanyakan dari konflik tersebut mempunyai nuansa agama yang sangat kental.² Tetapi seperti biasanya, pemerintah dan elit politik cenderung untuk mengatakan bahwa konflik-konflik tersebut bukan konflik agama, tetapi agama hanya dijadikan alat penggalangan massa. Sering dipaparkan bahwa penyebab utama konflik-konflik tersebut adalah kesenjangan ekonomi atau pun pertarungan politik tingkat atas, dan agama hanya label yang diikutsertakan untuk mendapatkan dukungan.

Jika memerhatikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, maka akan terlihat dengan jelas bahwa adanya unsur-unsur agama yang menjadi pemicu dan pelestari konflik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas misalnya pada konflik di daerah Maluku yang masih berkepanjangan. Siapa yang berani menyangkal bahwa ada nuansa agama yang kental dalam konflik tersebut,³ tetapi juga terlalu menyederhanakan masalah apabila dikatakan bahwa konflik Maluku *semata-mata* adalah masalah agama. Jelas ada masalah-masalah lain yang terkait, tetapi unsur agama telah menyebabkannya menjadi begitu besar dan berkelanjutan. Dalam konflik Maluku yang berkelanjutan, masalah agama nampaknya seperti bensin yang akan terus menyulut kemungkinan terjadinya pertikaian.

Perhatikan juga fenomena penutupan tempat ibadah oleh kelompok-kelompok tertentu dengan alasan yang sangat kental bernuansa agama: kristenisasi, meski sering kali ditampilkan alasan pemberlakuan SKB tentang rumah ibadah. Nuansa agama juga terlihat pada nama kelompok

²Sebenarnya sudah sejak awal Juni 1995 telah terjadi perusakan gedung-gedung gereja di Surabaya. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 10 Oktober 1996 telah terjadi pembakaran terhadap 24 gereja Katolik atau Protestan di daerah Situbondo dan sekitarnya. Peristiwa-peristiwa tersebut diikuti juga dengan peristiwa-peristiwa sejenis meskipun dalam skala yang lebih kecil di berbagai tempat di Indonesia. Harapan bahwa di era yang baru hal yang seperti itu tidak lagi terjadi nampaknya tidak menjadi kenyataan, seperti yang terlihat dalam konflik terbuka yang pecah di Maluku sejak 19 Januari 1999.

³Aparat kepolisian pun mau tidak mau nampaknya harus mengakui bahwa agama menjadi faktor utama "pelestari" konflik antar agama di Ambon. Irjen Pol. Muhammad Firman Gani, yang pernah bertugas sebagai Kepala Polda Maluku dari Juni 2000-Mei 2001 mengakui adanya keterlibatan oknum-oknum aparat yang memberikan dukungan moral dan bahkan persenjataan kepada mereka yang bertikai di Maluku (lih. "Kesaksian Polisi di Ambon," *Kompas* (Senin, 6 Agustus 2001) 12.

ini: Gerakan Anti Pemurtadan.⁴ Masih dapatkah dipungkiri kenyataan bahwa pada lapisan masyarakat “gesekan” antar pemeluk agama terus berlangsung? Bahkan, tidak jarang terjadi pula “gesekan” di dalam kelompok penganut agama tertentu. Jika mengingat penyerbuan ke kampus aliran Ahmadiyah beberapa waktu yang lalu, bukankah hal-hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bijaksana dalam menyikapi keragaman antar dan di dalam agama sendiri?

Ini mungkin salah satu masalah yang berkenaan dengan kemajemukan agama, di mana sering kali ditolak untuk diakui bahwa selama ini kemajemukan agama telah menjadi seperti bensin yang bisa memicu dan melestarikan pertikaian. Kata-kata sloganistik seperti dulu: “Tidak ada konflik agama di Indonesia, yang terjadi justru adanya konflik-konflik sosial, maka hubungan antar kelompok agama justru semakin erat” tidak lagi dapat dipakai untuk menutupi kenyataan yang ada.⁵ Terhadap kecenderungan ini Eka Darmaputera dengan suatu gambaran yang jelas menyatakan,

Dan saya khawatir. Sebab hanya bila kita mau mengakui bahwa *ada* persoalan di situ, ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Tapi bila mengaku sakit saja tidak mau atau malu, bagaimana mungkin kita mau ke dokter?⁶

APA YANG DIHASILKAN DENGAN PENDIDIKAN AGAMA SELAMA INI?

Sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, agama-agama mendapatkan porsi

⁴“Mewaspadaai Kristenisasi dan Fitnah Terhadap Umat Islam,” <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=272>

⁵Perhatikan kalimat *klise* yang ditulis oleh Menteri Agama (waktu itu) Tarmizi Taher, “Bimbingan dan pelayanan pemerintah terutama untuk membantu sarana dan kemudahan bagi pemeluk-pemeluk agama agar dapat melaksanakan ajaran agama masing-masing. Kerukunan hidup antar umat beragama sangat baik, serasi, mantap dan dinamis” (lih. Departemen Agama Republik Indonesia, *Bingkai Teologi Kerkunan Hidup Umat Beragama Menurut Pandangan (Kristen) Protestan* [Jakarta : Depag Bimas Kristen Protestan, 1997] ix).

⁶“Tantangan terhadap Penghayatan Agama Dewasa Ini dan Alternatifnya di Masa Depan: Musuh Agama Bukan Sesama Agama tetapi Syaitan-Syaitan,” *Penuntun* 3/11 (April 1997) 252.

perhatian yang cukup besar di Indonesia. Indonesia mungkin salah satu dari sedikit negara yang merasa perlu untuk mempunyai departemen agama yang mengurus baik masalah antar agama maupun intern agama. Walau ternyata justru di departemen di mana nama Tuhan sering kali disebut, di situ juga terjadi salah satu korupsi terbesar di republik ini.

Salah satu bentuk perhatian yang cukup besar adalah adanya ketentuan untuk adanya pelajaran agama dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Pemerintah nampaknya ingin menunjukkan betapa pentingnya agama bagi setiap penduduk, sehingga pendidikan agama tidak hanya menjadi urusan intern agama tetapi juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tetapi apa yang dihasilkan oleh pendidikan agama di negeri ini sampai saat ini? Apakah pendidikan agama ini telah menghasilkan pribadi-pribadi yang mengenal agamanya sendiri dan menaruh penghargaan terhadap agama lain? Menilik konflik-konflik dengan nuansa agama yang kental, saya tidak berani menjawab pertanyaan di atas. Nampaknya ada yang salah dengan pendidikan agama sehingga masalah moral terus menerus menjadi hantu di bangsa ini. Pendidikan agama tampaknya telah gagal menghasilkan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam beragama. Hal ini terbukti dengan maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kegagalan itu tampak juga dalam ketidakberhasilan menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat menyatakan penghargaan terhadap agamanya sendiri dan agama lain.

Sebagian besar yang dihasilkan dari pendidikan agama selama ini mungkin hanya orang-orang memiliki pemikiran yang terpecah dalam beragama. Pendidikan seperti ini kurang berhasil dalam menciptakan orang-orang yang mencintai agamanya sendiri, tetapi telah “berhasil” menciptakan orang-orang yang mudah dipicu kebenciannya terhadap agama lain. Pendidikan yang tampaknya telah berhasil membuat orang mencintai simbol-simbol keagamaan, seperti: masjid, gereja, hosti, dan kitab suci agama; sensitif terhadap isu-isu seperti: kristenisasi, “penghijauan,” tetapi tidak menghidupi kebenaran agama itu dalam hidup keseharian, sehingga tidak mengherankan apabila ada gangguan terhadap simbol-simbol keagamaan, maka menjadi sah hukumnya untuk melukai bahkan membunuh insan-insan beragama lain, atau kalau perlu yang masih seagama tetapi berbeda pandangan. Hal ini juga menandakan adanya kegagalan pada usaha untuk menumbuhkan rasionalitas dalam pendidikan keagamaan. Kegagalan untuk menumbuhkan rasionalitas dalam keagamaan terlihat dengan masih maraknya kesetiakawanan yang

buta dalam kelompok-kelompok agama.⁷ Kesetiakawanan buta ini nampaknya cukup mewarnai begitu banyak konflik bernuansa agama di Indonesia.

APA YANG SALAH DENGAN PENDIDIKAN AGAMA SELAMA INI?

Mencermati pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait, baik instansi keagamaan maupun pendidikan akan membuka wawasan untuk melihat apa yang sebenarnya tidak *pas* dengan pendidikan agama yang selama ini berlangsung. Dalam khazanah pendidikan, ada tiga unsur yang penting bagi terlaksananya pendidikan: sumber daya manusia, metode, dan materi pendidikan. Karena tiga hal ini sebenarnya sangat berkaitan erat, maka jika pembagian pembahasan terpaksa dilakukan maka tidak terhindarkan akan terjadinya *overlapping*.

Salah satu masalah klasik berkenaan dengan sumber daya manusia—dalam pembahasan ini hanya menyinggung tentang pendidik—adalah relatif rendahnya kualitas intelektual. Selama ini boleh dikatakan bahwa bidang agama sering kali hanya menjadi pilihan terakhir (yang tentu saja dianggap tidak bergengsi) dari interes seseorang. Ketika bidang-bidang studi lain sudah tertutup pintunya, bidang studi agama nampaknya menjadi semacam *vacum cleaner* yang menyedot mereka yang “tersisa.” Tentu tidak dapat disangkal bahwa ada orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi yang menekuni bidang ini sebagai panggilan hidupnya, tetapi jumlah orang yang seperti ini tentunya terlalu sedikit bila dibandingkan dengan mereka yang menjadikan bidang agama sebagai pintu darurat, ketika semua kesempatan telah tertutup.

Dalam khalayak umum, memang lazim dijumpai pandangan bahwa bidang studi agama adalah bidang studi yang *ecek-ecek* alias mudah, murah dan tidak terlalu penting. Rendahnya tingkat penghargaan khususnya dalam bentuk finansial, telah menjadi salah satu mata rantai yang sulit terputuskan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik.

Dalam wacana diskusi pluralitas agama pun, para pendidik seolah-olah telah tertinggal kereta dan memang kadang sepertinya sengaja ditinggalkan. Wacana diskusi pluralitas selama ini hanya diikuti oleh para pemikir dan aktivis lembaga-lembaga yang besar dan jarang sekali

⁷Paul Ngganggung, “Pendidikan Agama dalam Masyarakat Pluralistik” dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (ed. Th. Sumarhana, et. al.; Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2001) 263.

melibatkan guru agama. Padahal guru agama adalah ujung tombak yang sangat potensial dalam memberikan wawasan pluralitas agama ke tingkat *grassroot*. Ketika tidak ada usaha secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan guru agama dengan isu yang kekinian, maka guru dan akibatnya juga apa yang diajarkannya akan terus tertinggal dari perkembangan nyata yang terjadi di tengah lapangan masyarakat.

Berkenaan dengan metode, selama ini tampaknya, metode pendidikan agama di Indonesia lebih menekankan pada tercapainya kemampuan kognitif dalam pengetahuan agama. Pendidikan agama telah menjadi sekedar penyampaian informasi kebenaran-kebenaran agama yang harus dipahami oleh para murid. Kebenaran-kebenaran itu bahkan ditampilkan sebagai “sosok” yang harus diterima dengan begitu saja, pantang untuk dipertanyakan kebenarannya. Seorang pendidik menyampaikan kebenaran-kebenaran yang nyaris tidak dikontekstualisasikan untuk diterima oleh murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan pendidikan agama adalah apa yang mungkin disebut Freire sebagai pendidikan gaya bank.⁸ Sebuah wacana pendidikan yang hanya menekankan transfer informasi saja.

Ketika transfer informasi saja menjadi apa yang diharapkan terjadi di kelas-kelas, maka hal ini menghasilkan suasana pendidikan bercorak naratif, di mana pendidik (yang diyakini sebagai sumber kebenaran) akan bercerita dan mentransfer kebenaran kepada peserta didik (yang dianggap tidak tahu apa-apa). Tidak ada diskusi yang berarti dan berbobot untuk mempertanyakan kebenaran ajaran agama, karena diyakini bahwa kebenaran itu memang bukan untuk dipertanyakan. Pemikiran kritis peserta didik tidak diharapkan muncul, karena toh kebenaran itu bukan untuk dikritisi. Pola pendidikan yang dogmatis seperti ini akan melahirkan sikap eksklusivisme yang kental pada diri peserta didik.⁹

Berkenaan dengan materi, secara umum, hal-hal yang menjadi materi pendidikan agama bisa dikategorikan dalam dua bagian besar: ajaran (doktrin) dan praktik agama. Tampaknya titik berat materi pelajaran agama yang ada di dalam kelas-kelas pendidikan masih berkisar pada masalah ajaran, dengan memberikan penekanan yang kurang terhadap masalah praktik agama. Tentu tidak bisa disangkal bahwa ajaran

⁸Uraian lebih lanjut tentang pemikiran Freire dapat dilihat dalam Wahyu Pramudya, “Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara *Banking Concept of Education*, *Problem Posing Method*, dan Pendidikan di Indonesia,” *Veritas* 2/2 (Oktober 2001) 245-255.

⁹Kautsar Azhari Noer, “Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama” dalam *Pluralisme* 227.

(doktrin) adalah elemen penting dari penghayatan agama seseorang, tetapi doktrin tanpa praktik agama adalah omong kosong belaka.

Karena bertitik tolak pada materi yang bersifat ajaran (doktrin) maka isu-isu praktik keagamaan pada masa kini sering kali tidak dibahas dalam kelas-kelas yang ada. Padahal masalah praktik agama adalah masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sayangnya justru masalah itu bukan merupakan materi pelajaran di kelas-kelas. Misalnya, isu tentang penutupan tempat ibadah yang dilakukan oleh massa di sekitarnya yang terjadi saat ini. Apakah terjadi diskusi di dalam kelas tentang hal ini? Jika tidak, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara apa yang dipelajari dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Apa yang ideal dengan apa yang dipraktikkan, sehingga pendidikan agama sering kali dipandang tidak relevan.

Dalam kaitannya dengan agama lain, apabila ada satu agama juga mengajarkan agama lain sebagai usaha apa yang disebut sebagai perbandingan agama, maka lazim dijumpai bahwa pendekatan yang dipakai adalah pendekatan apologetis. Sebuah pendekatan pembelaan keyakinan agama sendiri sekaligus penyerangan terhadap keyakinan agama lain. Tidak ada semangat yang jujur dan bergairah untuk mendengar agama lain berbicara.

PENDIDIKAN AGAMA SEPERTI APA YANG DIPERLUKAN?

Untuk menjawab tantangan dalam mencari bentuk pendidikan agama yang cocok ditengah pluralitas agama ini, tampaknya terlebih dahulu harus dipikirkan *output* seperti apa yang diharapkan akan muncul sebagai hasil pendidikan agama. Tentunya *output* yang diharapkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan di tengah pluralitas agama saat ini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mencoba memahami apa yang dibutuhkan umat beragama untuk dapat “hidup” di Indonesia. *Pertama*, ada kebutuhan untuk meningkatkan tingkat penghayatan umat terhadap keyakinannya sendiri. Kebutuhan ini dirasa penting dan mendesak, mengingat sebagai bagian dari bangsa, tentu umat beragama sedikit banyak terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan bangsa dalam keadaan terpuruk seperti sekarang. *Kedua*, adanya kebutuhan untuk mendidik umat untuk bisa menghargai keyakinan agama lain, tanpa harus mengorbankan identitas diri sebagai bagian dari kelompok agama tertentu. Dalam menghadapi agama lain, terdapat dua titik ekstrem yang harus dihindari. Titik ekstrem pertama adalah semangat fundamentalisme yang memandang rendah bahkan “mensetankan” agama lain. Semangat fundamentalisme sering kali ditandai dengan keenggan dan bahkan

ketidaksukaan untuk membuka pintu dialog bersama dengan agama lain. Titik ekstrem kedua adalah pluralisme, cenderung mengaburkan dan mengorbankan keunikan ajaran agama sendiri demi kebersamaan bersama orang lain. Yang perlu ditemukan adalah titik imbang di antara dua ekstrem itu. Pendidikan keagamaan seharusnya diarahkan pada usaha untuk menghasilkan umat beragama yang mengenal dan menghayati ajaran agamanya sendiri, serta mampu bersikap dengan bijaksana terhadap ajaran agama lain. Bijaksana di sini mempunyai arti tidak menganggap ajaran agamanya sama saja dengan agama lain, tetapi juga tidak menganggap bahwa ajaran agama lain sepenuh-penuhnya salah. Secara garis besar, mungkin pernyataan Jedidah T. Posumah-Santoso ini dapat merangkumkan tujuan dari pendidikan agama.

Sasaran akhir dari pendidikan (agama) haruslah seorang pribadi yang memiliki integritas diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiaikan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah kepada manusia.¹⁰

BEBERAPA USULAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA

Apabila memang yang dibutuhkan oleh pendidikan agama di Indonesia adalah manusia-manusia yang menghayati dan menjalankan ajaran agamanya sendiri, sekaligus menaruh rasa hormat dan kesediaan untuk berdialog dengan penganut agama lain, maka penulis mengusulkan beberapa usulan berikut ini.

Pertama, perlunya melibatkan pendidik keagamaan pada pelbagai level pendidikan dalam upaya dialog antar umat beragama. Para pendidik keagamaan dari level terendah sampai tertinggi (SD sampai dengan PT ataupun lembaga pendidikan keagamaan tertentu) tidak dapat disangkal merupakan ujung tombak dalam pendidikan agama yang mempunyai akses untuk mencapai *grass root*. Kemampuan untuk mencapai dan mempengaruhi *grass root* inilah yang selama ini mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam dialog antar umat beragama. Padahal boleh dikatakan hampir pada setiap kerusuhan yang bernuansa agama, pelakunya adalah massa *grass root*. Dari sisi pendidik agama, hal ini menjadi perlu dilakukan mengingat merekalah yang selama ini terlibat

¹⁰“Pluralisme dan Pendidikan Agama di Indonesia” dalam *Pluralisme* 286.

dengan isu-isu masalah keagamaan pada tingkat praktik sehari-hari. Para pendidik itu juga memerlukan *up-grade* pengetahuan tentang isu-isu teologis yang bersifat kekinian agar tidak ketinggalan, gugup dan gagap dalam merespons perubahan-perubahan perilaku keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat pergeseran orientasi teologi.

Kedua, perlunya memikirkan ulang metode pengajaran agama di dalam kelas-kelas pendidikan agama. Karena pendidikan agama selama ini cenderung dipandang sebagai masalah transfer nilai-nilai agama yang dogmatis, maka situasi pendidikan di kelas pun akan cenderung untuk bersifat otoritatif dan satu arah. Peserta didik diharapkan untuk menerima kebenaran-kebenaran ajaran agama sebagai suatu kebenaran yang final dan mutlak sehingga mempertanyakan kebenaran itu dipandang sebagai suatu sikap pemberontakan. Dalam konteks seperti ini benar pemikiran Freire bahwa yang sering terjadi di dalam kelas-kelas pendidikan (termasuk di dalamnya pendidikan agama) adalah pendidikan bergaya bank. Dalam pendidikan gaya bank arah proses pendidikan adalah satu arah dan bukan dialogis.¹¹

Titik bahaya dari pendidikan yang bersifat satu arah dan bukannya dialogis dalam pendidikan keagamaan adalah terciptanya suatu kecenderungan untuk bersifat dogmatis yang beku dan kaku dalam menerima atau menilai ajaran suatu agama. Peserta didik yang sudah terbiasa dikondisikan untuk menerima begitu saja ajaran agama yang diyakininya akan menjadi terkejut bahwa di dalam lapangan kehidupan nyata dalam keberadaan agama, ternyata ada begitu banyak orang yang mempertanyakan klaim-klaim kebenaran yang diyakininya. Peserta didik yang sudah terbiasa dengan pola terima sepenuhnya dan jangan dipertanyakan, akan kaget dengan realita adanya orang-orang yang tidak bisa menerima dan cenderung kritis terhadap keyakinan yang dianut peserta didik. Metode pendidikan satu arah tidak mempersiapkan seseorang untuk siap dipertanyakan keyakinannya. Keterbatasan ini yang mungkin bisa sedikit diatasi dengan pendidikan yang bersifat dialogis. Pendidikan yang bersifat dialogis, lebih dari sekedar penyampaian materi, akan mempersiapkan peserta didik pada kenyataan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pun interaksinya bersifat dialogis dan bukan monolog. Bahwa di dalam lapangan kehidupan, bertanya dan mempertanyakan kebenaran tidak identik dengan sikap pemberontakan terhadap kebenaran, sehingga apabila terjadi kontak teologis dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik sudah terbiasa dengan iklim berdialog

¹¹Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire" 249.

dan terbuka untuk dipertanyakan kebenaran ajaran agamanya, tanpa ada perasaan tersinggung dan terancam.

Ketiga, perlunya mengadopsi isu-isu praktik keagamaan sehari-hari dalam kurikulum pendidikan agama. Apabila memerhatikan kurikulum pendidikan agama, maka akan tampak bahwa sebagian besar kurikulum tersebut sibuk untuk membahas isu-isu doktrinal keyakinan agama. Peserta didik harus “menelan” begitu banyak kebenaran-kebenaran teologis ajaran agamanya sendiri seolah-olah dengan mengetahui agamanya sendiri maka menjadi cukup baginya untuk hidup di dalam masyarakat. Pada kenyataannya terbentang jurang yang lebar dan mungkin juga dalam antara apa yang ideal dengan kenyataan praktik sehari-hari di dalam masyarakat. Penguasaan materi atas ajaran agama yang bersifat doktrinal tidak dengan sendirinya akan mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi isu-isu kehidupan berkenaan dengan agamanya sendiri, apalagi menyangkut agama yang dianut oleh orang lain. Isu-isu praktik keagamaan sehari-hari seperti: perlukah saya mengucapkan selamat apabila ada penganut agama tertentu merayakan hari besarnya? Bagaimana saya menyikapi adanya kenyataan bahwa di dalam keluarga saya ada orang yang berpindah agama? Bagaimana saya bersikap ketika tempat ibadah saya dirusak oleh massa? Isu-isu seperti ini perlu dibahas di kelas pendidikan agama dalam situasi kelas yang dialogis tentunya. Sangat disesalkan bahwa yang terjadi saat ini adalah “*current issues*’ atau ‘*living issues*’ biasanya belum segera dapat terserap materi.”¹² Padahal, pembahasan yang bersifat dialogis terhadap isu-isu kehidupan sehari-hari itu akan menolong peserta didik untuk mengambil sikap secara bijak terhadap kenyataan praktik kehidupan agama sehari-hari. Boleh dikatakan bahwa tidak jarang isu-isu kehidupan sehari-hari yang tidak ditanggapi dengan bijak itu berpotensi untuk melahirkan perseteruan yang bernuansa agama yang kental.

Keempat, perlunya mengusahakan perjumpaan antar penganut agama di dalam menghadapi masalah-masalah bersama. Perjumpaan antar agama yang sudah terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari, perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan suatu aksi bersama antar pemeluk agama. Pada tataran pendidikan di lembaga-lembaga formal, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan suatu aksi sosial bersama: mengunjungi panti asuhan, tempat perawatan korban narkoba, tidak dengan mengatasnamakan lembaga keagamaan tertentu saja, tetapi merupakan aksi sosial lintas agama. Hal ini berguna untuk membuka

¹²M. Amin Abdullah, “Pengajaran Kalam dan Teologi dalam Era Kemajemukan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode” dalam *Pluralisme* 250.

perspektif para peserta didik bahwa ada begitu banyak fenomena sosial yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Sikap mau bekerja sama dengan agama lain ini harus mulai ditanamkan sejak dini (SD atau SMP), sehingga tidak menjadikan peserta didik menjadi gugup dan gagap di kemudian hari ketika ia harus bekerja sama dengan penganut agama lain.

Kegunaan lain dari kegiatan bersama lintas keagamaan seperti ini adalah untuk mereduksi kecurigaan terhadap aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh lembaga dari agama tertentu saja. Selama ini sepertinya salah satu isu yang mengganggu keharmonisan antar agama adalah adanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan atau dipandang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyebaran agama tertentu. Tentu, sebagai pengantar mengusahakan perjumpaan antar penganut agama di dalam menghadapi masalah-masalah bersama, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan tentang ajaran agama-agama lain juga. Pengajaran tentang agama-agama lain ini hendaknya dilakukan di dalam ketulusan dan kebenaran, dan tidak dengan maksud mencari kesalahan dan kejelekan ajaran agama lain. Pendekatan seperti ini menurut Kadarmanto Harjowasito, yang berbicara dari perspektif Kristen:

akan membantu nara didik untuk dapat melihat kekhasan cara pandang iman Kristen terhadap pokok tersebut dan serentak belajar dari dan tentang cara pandang iman lain. Lalu apa tujuannya? Jelas tujuannya membantu warga gereja dan generasi muda Kristen untuk memiliki identitas, komitmen yang jelas, akan tetapi tidak dengan mengorbankan kemampuan untuk hidup dan berinteraksi di dalam masyarakat yang sangat majemuk secara positif.¹³

¹³“Pendidikan Agama Kristen dalam Konteks Indonesia yang Majemuk” dalam *Berakar di dalam Dia, dan Dibangun di atas Dia* (ed. Robert Borrong, et. al.; Jakarta: Gunung Mulia, 1998) 117.

PENUTUP

Pluralitas agama nampaknya akan senantiasa menantang para pemeluk agama di Indonesia untuk mengambil suatu sikap yang bijaksana. Pemeluk agama di Indonesia perlu belajar untuk “hidup” bersama-sama. Tidak dengan mengorbankan identitas keagamaan demi apa yang sering kali secara salah disebut sebagai toleransi dan keharmonisan, tetapi juga tidak hidup di dalam semangat triumphalistis yang cenderung “mensetankan” agama yang dianut orang lain. Perlu disadari bahwa musuh agama bukanlah agama-agama lain, musuh penganut agama tertentu bukan penganut agama lain. Eka Darmaputera menulis dengan lugas:

Musuh agama adalah itu, syaitan-syaitan itu. Dan syaitan-syaitan itu adalah musuh bersama dan musuh utama semua agama. Ketika agama berhasil mengalahkan jebakan institusionalisme, formalisme, dogmatisme, dan ritualisme, lalu dengan serius menaruh kepedulian etis, ketika itulah pintu dialog dan kerja sama antar Agama terbuka dengan lebar.¹⁴

Pendidikan agama, baik yang dilakukan dalam institusi umum atau keagamaan, tampaknya terus akan menjadi ujung tombak yang diharapkan berperan banyak dalam menghasilkan manusia-manusia yang mampu menghayati agama sendiri dan hidup bersama agama lain. Menyimak apa yang terjadi belakangan ini, nampaknya ujung tombak itu perlu diasah supaya lebih tajam. Merupakan tanggung jawab bersama untuk mengasah ujung tombak itu sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

¹⁴“Tantangan terhadap Penghayatan” 260.